

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Thailand adalah Negara yang tidak pernah dijajah oleh kolonialisme, ini yang sedikit membedakan Thailand dengan Negara-negara tetangganya di Asia tenggara namun demikian Negara modern Thailand baru di mulai ketika gerakan terpelajar tahun 1930-an berhasil menjatuhkan Monarki Absolut dan menggantikannya dengan pemerintahan sipil modern. Namun belum setahun berkuasa pemerintahan sipil ini kemudian di gulingkan oleh militer lewat kudeta militer, inilah sejarah awal militer Thailand mengambil kepemimpinan politik di pemerintahan.

Militer Thailand awalnya adalah tentara kerajaan yang memiliki kesetiaan cukup tinggi pada raja/kerajaan, dalam perang dunia ke.II melawan Fasisme Jepang tentara Thailand sudah menggunakan konsepsi tentara modern (infanteri, kaveleri, artileri,dan lain-lain, system kepangkatan tentara modern). Pada saat itu meskipun sistem demokrasi parlementer sudah diperkenalkan tetapi ini lebih cocok disebut label semata karena tetap saja Militer dan kerajaan mendapatkan tempat khusus, bahkan konstitusi mengakui hak-hak istimewa tentara sebagai kekuatan politik yang sangat diperhitungkan.

Sejak di gunakannya sistem Demokrasi Parlementer tersebut,arena politik Thailand selalu diwarnai oleh persaingan antara politisi sipil dan militer . Persaingan ini menggunakan berbagai cara,termasuk dengan cara-cara inkonstitusional,yaitu dengan kudeta.Meskipun sejak pada tahun 1991 Thailand memperjuangkan,namun perjuangan rakyat Thailand ini tidak dapat menghentikan masuknya militer ke dalam arena politik kudeta sampai saat ini masih tidak bisa lepas dari perpolitikan Thailand.¹

Kudeta dalam kamus politik demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang harus dihilangkan dari sistem politik . Demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik menghendaki proses transformasi kekuasaan dilakukan melalui proses politik yang tidak mempergunakan instrument kekuasaan. Sehingga apapun alasan dibalik kudeta,bailk yang klise demi kesejahteraan umum,tertib sosial,penegakkan hukum ditolak keberadaannya.Termasuk dengan kudeta yang akhir-akhir ini terjadi di Thailand maupun di Filipina.²

Kudeta seakan seperti tradisi di negeri gajah putih ini .Sejak berakhirnya sistem pemerintahan monarki absolut 1932 tersebut ,telah tercatat 24 kali terjadi kudeta militer di negeri gajah putih ini,11 kali diantaranya berhasil yaitu kudeta 24 Juni 1932,20 Juni

¹ Sejarah jalan panjang demokrasi di Thailand: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-thailand-> diakses pada 14 Juni 2017 pukul 20:00 WIB.

² Definisi Kudeta militer dalm politik demokrasi : <http://surwandono.staff.ums.ac.id/> diakses pada 31 Juli 2017 pukul 13:20 WIB.

1933 ,9 November 1947,29 November 1951 , 26 September 1957,21 Oktober 1958 ,17 November 1971, 6 Oktober 1976 ,20 Oktober 1977,23 Febuari 1991 , 19 September 2006,dan kudeta 22 Mei 2014.³

Kudeta pertama itu menjadi titik awal dari perjalanan panjang masa transisi demokrasi di Thailand. Sejak saat itu, pihak militer mengambil kontrol atas kekuasaan selama beberapa dekade. Selama penguasaan atau masa pemerintahan junta militer tersebut terjadi beberapa kali perebutan kekuasaan di tubuh militer itu sendiri. Hingga pada tahun 1977 kelompok mahasiswa dan pihak sipil berhasil menjatuhkan kekuasaan junta militer. Dalam pemerintahan parlementer waktu itu memiliki tujuan untuk membangun demokrasi ditunjukkan dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, dan kebebasan politik, bahkan partai politik telah memiliki legitimasi. Kudeta ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer.

Pemerintahan parlementer bertahan hampir 12 tahun, Namun, pihak militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada Februari 1991. Hal ini disebabkan oleh Perdana Menteri Chatichai yang memerintah sejak tahun 1989

³ Kudeta militer di Thailand
<https://news.detik.com/internasional/2590861/thailand-dan-sejarah-panjang-11-kali-kudeta-militer> diakses pada 14 June 2017 pukul 20:30 WIB.

berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer. Hingga sekarang kondisi politik di Thailand terus berkecamuk dan terjadi beberapa kali junta militer.

Thailand merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia tenggara. yang sejak berlakunya sistem konstitusi kerajaan tahun 1932 diguncang 15 kali kudeta (24 kali kudeta sampai tahun 2014) merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami getir dan pahitnya penjajahan asing. Namun senantiasa dibuat panas oleh gerilyawan komunis - komunis sejak tahun 1960-an.⁴

Sejarah gelap Thailand kembali terulang sering dengan keputusan Jenderal Prayuth mengambil alih pemerintahan. Krisis politik yang berujung kudeta ini bermula dari demonstrasi menuntut pengunduran diri PM Yingluck Shinawatra sejak November tahun lalu. Aksi protes itu dipicu oleh amnesti yang diberikan pemerintah kepada Thaksin. Amnesti yang membatalkan vonis dua tahun penjara yang diterima Thaksin karena kasus korupsi pada 2008 tersebut memungkinkan kakak kandung Yingluck ini pulang dari pengasingannya sebagai orang bebas. Bagi kubu oposisi, pembebasan Thaksin telah mencederai rasa keadilan rakyat. Selama menjadi PM, pengusaha telekomunikasi itu terbukti

⁴ Iwan Gayo, Buku Pintar Senior, Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2003, hal. 576 diakses pada 16 Februari 2018 pukul 08:21 WIB.

menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan kerajaan bisnis dan para kroninya.⁵

Sejak tahun 2005, masyarakat dan kondisi politik Thailand telah terjerembab dalam krisis mendalam yang karakternya ditandai dengan pembelahan antara mereka yang percaya dengan demokrasi dan mereka yang memilih diktatorian sebagai jalan. Di kelompok diktatorian terdapat tentara, para elit royalis, kelompok menengah dan gerakan royalis mereka yang bernama Kaus Kuning, Partai Demokrat dan kelompok-kelompok NGO.

Pada sisi demokrasi berdiri Kaus Merah; kelompok gerakan sosial terbesar dalam sejarah gerakan kontemporer Thailand, dan berbagai partai politik dari pengusaha kaya raya Thaksin Shinawatra dan saudari perempuannya Yingluck yang juga mendukung Kaus Merah. Partai mereka yang terakhir, yang memenangkan suara mayoritas dalam pemilu 2011, disebut Pheu Thai Party (PTP). Partai ini merupakan rekonstruksi dari partai-partai Thaksin terdahulu, yang dibubarkan oleh dua kudeta judisial yang terjadi berturut-turut. Sejak pemilu 2011, pemerintahan dikepalai oleh Yingluck Shinawatra, perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Thailand. Ini adalah pemerintahan yang dijatuhkan melalui kudeta Mei yang lalu.

⁵ Thailand Pasca-Kudeta : <http://www.asafri.com/2014/05/thailand-pasca-kudeta.html> diakses pada 14 Februari 2018 Pukul 19:30 WIB.

Krisis politik Thailand pada tahun 2014 berawal dari unjuk rasa di ibukota Bangkok tahun 2013 yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Pemerintahan pimpinannya dianggap dikendalikan oleh saudaranya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang mengasingkan diri ke luar negeri setelah digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006. Upaya Perdana Menteri Yingluck dengan menggelar pemilu dini tidak berhasil memecah kebuntuan politik setelah kubu oposisi memboikot pemungutan suara. Sejak Oktober 2010, Prayuth Chan-ocha menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Thailand.

Prayuth Chan-ocha merupakan pemimpin kudeta militer di Thailand yang menggulingkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada Mei 2014. Pernyataan kudeta ini hanya berselang dua hari setelah militer menyatakan kondisi darurat militer di Thailand. Namun, saat itu militer menegaskan keadaan darurat itu bukanlah sebuah kudeta. Saat kondisi darurat diumumkan, ribuan tentara didukung persenjataan dan kendaraan tempur disebar ke lokasi-lokasi vital, seperti pusat-pusat perekonomian, stasiun televisi, dan kawasan-kawasan perhotelan. Kudeta ini ditempuh setelah pernyataan keadaan darurat pada Selasa 22 Mei 2014 menyusul krisis politik yang melanda negara itu sekitar enam bulan belakangan. Jendral Prayuth Chan-ocha kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri, dengan dibantu oleh anggota

parlemen militer yang juga merupakan hasil penunjukan langsung oleh sang jendral, sebuah peristiwa yang sama sekali tidak mengejutkan. Prayuth bahkan tidak perlu menghadiri acara ‘pemilihan’ yang secara mutlak memenangkan dirinya.

Kudeta dilakukan berdasarkan alasan menghindari pertumpahan darah dan memulihkan stabilitas setelah terjadi krisis politik akibat kisruh antara pendukung Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan lawannya.

Berhasil dalam melancarkan kudeta, Prayuth Chan-ocha langsung mengumumkan militer mengambil alih penuh pemerintahan. Dia berjanji akan memulihkan ketertiban dan menerapkan reformasi politik.⁶

Sebelumnya, pihak militer melakukan aksi kudeta Pemerintah Thailand pada 22 Mei 2014. Kudeta ini muncul usai masyarakat Thailand melakukan aksi protes pada Pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra selama berbulan-bulan. Kudeta tersebut menuai banyak kecaman dari sejumlah negara Barat. Mereka menuntut militer Thailand untuk mengembalikan kekuasaan pada rakyat. Amerika Serikat dan Uni Eropa pun dikabarkan memutus sejumlah kerja sama dan kunjungannya ke Thailand.

⁶ kudeta militer terhadap Yingluck Shinawatra :
<https://nasional.sindonews.com/read/1052541/19/mengenal-para-pemimpin-kudeta-militer-1444655628/20> diakses pada 14 Februari 2018 pukul 11:27 WIB

Jelas sudah bahwa kudeta bukan hal yang baru lagi bagi Thailand. Dalam sejarah Thailand ,negeri ini telah mengalami 24 kali kudeta dalam kurun waktu 74 tahun.Namum kudeta yang terjadi pada tahun 2014 ini sungguh menarik perhatian dunia juga perhatian rakyat Thailand itu sendiri.

Kudeta yang terjadi di Thailand adalah kudeta yang mana para jenderal justru mencari momen yang tepat ,tatkala konsentrasi sipil untuk melakukan perubahan kepada rezim yang sedang berkuasa sudah kehabisan energi .Dalam hal ini masyarakat Thailand sudah sedemikian frustasi untuk menggulingkan Yingluck Shinawarta⁷

Thailand merupakan Negara yang mengganti sistem demokrasi parlementer.Namun hingga saat ini sistem perpolitikan yang berjalan di Thailand belum sepenuhnya mencerminkan perilaku sebagai Negara demokrasi yang matang . Hal ini terbukti dari rendahnya sistem “ *check and balance*” yang ada di Thailand .Oposisi dibuat sebagai alat kontrol terhadap pemerintahan dan ,sepenuhnya bertindak untuk kepentingan rakyat .Mereka akan mendukung pemerintah selama semua kebijakan yang ditetapkan demi kepentingan rakyat,tetapi mereka juga berhak memberi peringatan kepada pemerintah ketika pemerintah mulai mengabaikan

⁷ kudeta yang terjadi di Thailand :

<http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/06/24/analisis-tentang-teori-kudeta/> diakses pada 08 September 2017 pukul 18 :39 WIB.

segala kepentingan rakyat .Selain itu ,budaya oposisi juga merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan .Hal ini bertujuan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, sehingga dapat mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan secara tepat.⁸

Meskipun kudeta dalam kamus politik demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang akan dihilangkan dari sistem politik .Namun ,dalam perpolitikan Thailand yang baru saja menuju perkembangan demokrasi ,kudeta militer pun tetap di lancarkan oleh Pemimpin kudeta Jendral Prayuth Chan-ocha kepada Perdana Menteri Yingluck Shinawarta pada tanggal 23 Mei tahun 2014.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah

“ Mengapa militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan PM Yingluck Shinawarta pada tahun 2014”

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan penulisan karya tulisan ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang isi lain ilmu hubungan internasional yang dalam menguraikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kudeta militer terhadap PM Yingluck Shinawarta pada tahun 2014.

⁸ Sinaga, Lidya Christin. 2010. “Jalan Panjang Demokrasi Thailand” [online] dalam <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-thailand-.html> diakses pada 08 September 2017 19:05 WIB.

D. LANDASAN TEORI

Untuk memahami suatu permasalahan dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian di atas, di perlukan adanya sebuah kerangka berfikir. Kerangka pemikiran ini terdiri dari teori dan konsep yang berguna sebagai acuan dan panduan dalam melakukan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan Teori Kudeta.

Secara sederhana kudeta diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan militer untuk merebut kekuasaan, atau aksi politik untuk menggantikan (mendominasi) suatu kelompok atau rezim yang menjadi saingannya dengan rezim sendiri.

Kudeta militer merupakan suatu budaya politik dalam militer Thailand sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa atau perbedaan politik antara militer (atau suatu faksi militer) dan aktor aktor politik lainya (sipil maupun faksi militer lainya). Cara- cara kudeta menurut Suchit Bongkarn antara lain dapat berupa pengawasan ketat oleh militer terhadap pemerintahan sipil atau partai politik tertentu yang dipercaya namun dibawah pengawasan militer. Ada pula dengan cara interfensi terbatas dan interfensi langsung(tanpa disusul dengan kudeta).

a. Ciri-ciri kudeta

(1) dilancarkan secara mendadak, “kilat“, dan sangat rahasia.

(2) harus didukung “power“ dahsyat-hanya kekuatan militer yang mampu melaksanakannya.

(3) kudeta selalu berkonotasi ilegal, tidak konstitusional.

(4) biasanya berakibat berdarah-darah, meski ada juga bloodless cout d’etat.

Kudeta harus dibedakan dengan „revolusi“. Proses revolusi biasanya lebih lama, dari kekuatan kecil kemudian semakin besar, dan akhirnya tiba pada puncaknya sebagai satu kekuatan massa yang mampu menjatuhkan pemerintahan yang sah. Revolusi biasanya tidak ditunjang kekuatan senjata, sebab militer masih solid di belakang rezim yang berkuasa. Gerakan rakyat menjatuhkan rezim Ferdinand Marcos di Manila pada Februari 1986 adalah sebuah revolusi. Gerakan rakyat pimpinan Vladimir Lenin menjatuhkan kekuasaan Tzar di Rusia adalah revolusi. Maka, dinamakan October Revolution (1917). Kejatuhan Presiden Mubarak awal Maret lalu juga merupakan hasil revolusi.

Ada perbedaan lain antara kudeta dan revolusi. Kudeta berlangsung dari dalam (internal) rezim sendiri. Ingat, tentara adalah bagian dari pemerintah. Sebaliknya, revolusi bergerak dari luar. Dengan sendirinya, pada kasus kudeta, prosesnya amat sangat rahasia; sedangkan revolusi berlangsung terbuka. Siapa saja yang berminat, dipersilakan bergabung dalam gerakan rakyat. Maka, gerakan semakin lama semakin menggelembung. Kekuatan massa,

yang kadang hingga jutaan jumlahnya, itulah yang akhirnya memaksa penguasa meninggalkan istana, lari terbirit-birit. Presiden Marcos dipaksa melarikan diri ke Amerika setelah satu juta lebih rakyat berkumpul di Makati, kota pinggiran Manila. Raja Pahlevi dari Iran juga dipaksa lari dan diselamatkan oleh Washington, setelah Ayatullah Khomeini dengan gemilang memimpin sebuah revolusi dahsyat yang mencengangkan seluruh dunia.

Kudeta, seperti sudah disinggung di atas, merupakan gerakan militer, sempalan dari angkatan bersenjata yang membelot secara rahasia. Gerakan ini bisa gradual dengan cara menginfiltrasi sistematis ke dalam kekuasaan, tapi umumnya dilancarkan secara mendadak dari luar induk militernya. Contoh kudeta melalui infiltrasi sistematis tentara sempalan adalah Gerakan 30 September/PKI di negara kita pada 1965. Kudeta militer PKI dilancarkan setelah bertahun-tahun kelompok-kelompok tertentu ABRI yang tidak puas dengan pemerintahan Soekarno dipengaruhi dan “dibina” PKI. Kemudian mereka dengan bangga serta penuh “rasa revolusioner” menggembosi ABRI dari dalam.

kudeta adalah kata kerja yang berarti perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Kalau menurut Samuel P. Huntington ada 3 jenis Kudeta yaitu:

1. Kudeta sempalan dilakukan oleh sekelompok bersenjata yang dapat terdiri dari militer atau tentara

yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan tradisional saat itu kemudian melakukan gerakan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tradisional dan kemudian menciptakan elit birokrasi baru.

2. Kudeta wali dilakukan oleh sekelompok tujuan kudeta seperti pada biasanya akan mengumumkan diri sebagai perwalian guna untuk meningkatkan ketertiban umum, efisiensi, dan mengakhiri korupsi akan tetapi pada kenyataan tidak akan ada perubahan yang mendasar pada struktur kekuasaan pada umumnya, para pemimpin kudeta akan menggambarkan diri dan tindakan mereka sebagai sementara dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Setelah ada pemimpin baru yang dipilih secara demokratis, mereka siap mundur. Contoh paling gamblang adalah kudeta militer terhadap pemerintahan Thaksin pada 2006. Kudeta tanpa satu pun peluru meletus ini langsung mendapat restu dari Raja. Para Jenderal pelaku kudeta pun berjanji segera melangsungkan pemilu untuk memilih pemimpin baru.



3. Kudeta veto, menurut Huntington, adalah gerakan militer untuk melawan kekuasaan sipil, melawan keputusan rakyat yang sebenarnya diambil melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional. Contohnya, kudeta militer di Cile 1973. Salvador Allende sesungguhnya pemimpin yang secara sah dipilih rakyatnya. Hanya karena Allende dituding hendak membawa Cile ke “kiri” dan militer Cile termasuk “antek barat“ maka militer akhirnya menjatuhkan pemerintahan Allende. Kudeta jenis ketiga ini juga kerap diwarnai pertumpahan darah. Militer dengan segala kekuatannya memberangus dengan bengis perlawanan rakyat.

Dari sisi hukum konstitusi, kudeta jika berhasil dan dapat mempertahankan kekuatannya, maka kekuasaannya pada akhirnya dianggap sah menurut hukum meskipun melalui kudeta atau revolusi. Bahkan penguasa dapat mengganti atau merubah konstitusi dan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, dikenal juga cara perubahan konstitusi melalui cara diluar konstitusi, antara lain kudeta. Namun, jika kudeta gagal, maka pelakunya akan dipenjarakan sebagai pelaku kriminal yang sangat berat hukumannya dan pasti kudeta menimbulkan korban berdarah.

Intinya semua butuh dukungan rakyat. Tapi alangkah baiknya menggunakan cara-cara konstitusional dalam menuntut perubahan apapun. Pemerintah yang lahir dari cara kekerasan biasanya juga akan tumbang dengan cara kekerasan pula. Demokrasi bisa melahirkan kudeta, akan tetapi kudeta akan menciptakan kudeta-kudeta baru.⁹

Kudeta dalam kamus politik demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang akan dihilangkan dari sistem politik. Demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik menghendaki proses transformasi kekuasaan dilakukan melalui proses politik yang tidak mempergunakan instrumen kekuasaan. Sehingga apapun alasan di balik kudeta, baik yang klise demi kesejahteraan umum, tertib sosial, penegakkan hukum ditolak keberadaannya. Termasuk dengan kudeta yang akhir-akhir ini terjadi di Thailand maupun di Filipina.

kudeta sebagai sebuah proses politik yang diharamkan oleh tradisi demokrasi, namun akan menelisis tentang pergeseran aktor kudeta militer dibandingkan dengan sebelum tahun 1990-an. Ada perubahan yang sangat signifikan antara aktor kudeta militer sebelum tahun 1990-an dengan pasca 1990-an.

b. Aktor Kudeta

Dalam diskursus teori kudeta , aktor utama dalam setiap kudeta adalah para perwira menengah yang sedang menanjak jenjang

⁹ Teori kudeta dalam menurut Huntington :
<http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/kudeta.html> diakses pda 26 Febuari 2018 Pukul 12:57 WIB.

karirnya. Setidaknya ini terwakili oleh fenomena Muammar Khadafi, Gamal Abdul Nasser, Gregorio Honasan, Untung yang kesemuanya berpangkat Letnan Kolonel. Dalam pandangan Ted Guur, para perwira menengah ini mengalami deprivasi relatif antara harapan untuk terus berkarir secara mulus ke jenjang yang lebih tinggi dengan semakin sempitnya promosi untuk mendapatkan akses tersebut. Namun di sisi lain para perwira militer sedang bersama atau mengomandoi sejumlah pasukan yang mudah untuk dirubah kesetiaannya, dari kesetiaan pada negara kepada kesetiaan kepada komandannya. Dan sekaligus secara emosional sedang berada dalam puncak-puncak progresivitas.

Dalam dekade 1960-1990-an, hampir tidak ada pelaku kudeta adalah kalangan perwira tinggi atau jendral. Dalam pandangan teorisaasi sebelumnya, level jendral merupakan level keamanan, sudah tidak ada lagi pemikiran progresif untuk melakukan perubahan. Kalaupun ada beberapa kasus perwira tinggi mencoba bermain api dengan politik kudeta cenderung kemudian gagal.

Namun justru dalam beberapa tahun terakhir, justru kudeta oleh kalangan jendral terbukti berhasil dan kemudian membuat tertib sipil. Sebut saja Jendral Musharaff di Pakistan yang melakukan kudeta terhadap regim sipil Nawaz Sharif di 1997. Sampai saat ini regim Musharaff telah berusia hampir sekitar 10 tahun. Dan yang terakhir adalah kudeta yang dilakukan oleh Jendral Prayut Chan-

ocha di Thailand yang menggulingkan regim Sinawatra pada tanggal 22 Mei 2014. Namun percobaan kudeta yang dilakukan oleh para perwira menengah di Filipina cenderung gagal.

Dalam pandangan penulis, terdapat beberapa alasan yang paling krusial mengapa Jendral menjadi trigger bagi keberhasilan kudeta; pertama, para jendral yang melakukan kudeta adalah para jendral yang relatif muda, baik dalam usia dan pemikiran. Jendral Musharaff ketika melakukan kudeta masih berusia 50-an, demikian pula dalam ukuran penulis, Jendral Prayut adalah jendral yang progresif.

Kedua, para jendral yang melakukan kudeta adalah jendral dari organ angkatan darat. Pakistan dan Thailand adalah negara dengan basis agraris, sehingga otoritas dan anggaran untuk angkatan Darat lebih besar dibandingkan dengan organ militer lainnya. Prayut merupakan Jendral yang kredibel di mata kalangan militer Thailand, sehingga organ militer yang lain pada akhirnya memberikan dukungan atau minimal tidak melakukan pengkhianatan politik.

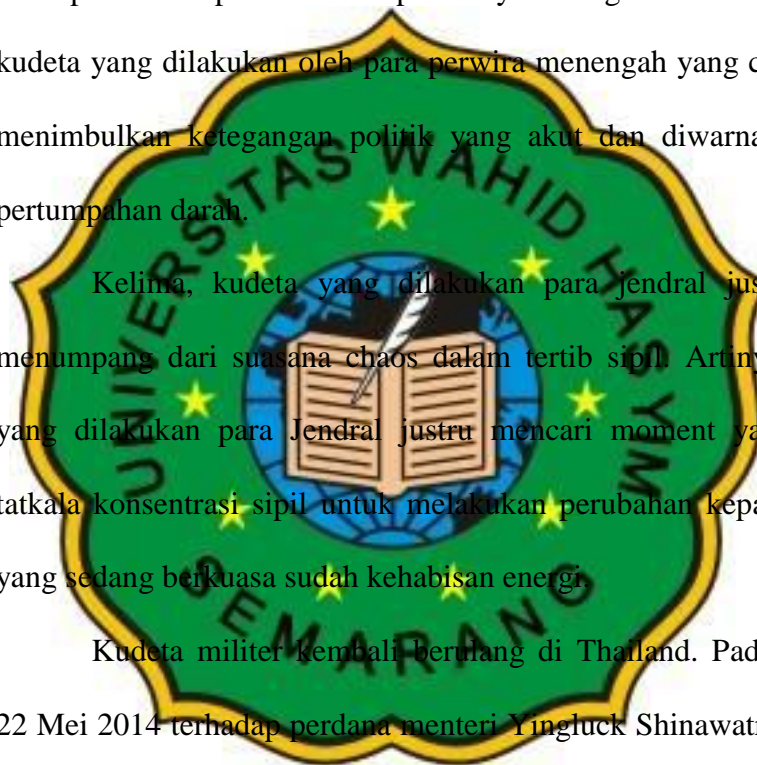
Ketiga, rezim sipil cenderung tidak membaca secara cermat skenario dan eskalasi politik yang dibangun oleh kalangan perwira tinggi militer. Dalam pandangan rezim sipil, adagium bahwa tidak akan pernah seorang Jendral melakukan spekulasi politik melalui kudeta, diyakini kebenarannya. Dalam konteks transformasi dan krisis politik, rezim sipil yang sedang berkuasa cenderung

melakukan pengawasan secara intensif kepada kelompok perwira menengah yang ditenggarai paling potensial melakukan kudeta.

Keempat, kudeta yang dilakukan para jenderal cenderung melahirkan tipologi kudeta yang tidak berdarah dan dihitung dengan kalkulasi yang tepat. Kudeta yang dilakukan oleh Musharaff dan Prayut relatif tidak menghabiskan amunisi militer untuk ditumpahkan kepada lawan politiknya. Sangat berbeda dengan kudeta yang dilakukan oleh para perwira menengah yang cenderung menimbulkan ketegangan politik yang akut dan diwarnai dengan pertumpahan darah.

Kelima, kudeta yang dilakukan para jenderal justru tidak menumpang dari suasana chaos dalam tertib sipil. Artinya kudeta yang dilakukan para Jenderal justru mencari moment yang tepat, tatkala konsentrasi sipil untuk melakukan perubahan kepada rezim yang sedang berkuasa sudah kehabisan energi.

Kudeta militer kembali berulang di Thailand. Pada tanggal 22 Mei 2014 terhadap perdana menteri Yingluck Shinawatra, militer Thailand melancarkan kudeta dan mengumumkan mengambil alih kekuasaan serta membubarkan kabinet, parlemen, dan membubar dua kelompok pengunjuk rasa yang selama 7 bulan . Dalam kehidupan politik Thailand, kudeta militer, khususnya angkatan darat, sering terjadi. Selama 74 tahun sejarah politik Thailand, telah



terjadi 24 kudeta militer, yang membuat negara ini dijuluki “negeri 1001 kudeta”.

Setelah berhasil lepas dari “tradisi kudeta militer” sejak demokratisasi bergulir pada awal 1990-an, kudeta militer ini menjadi gelombang surut demokratisasi di Thailand. Kudeta terjadi justru ketika instalasi demokrasi (institusionalisasi politik) telah berlangsung. Kudeta militer ini merupakan bukti betapa rute konsolidasi demokrasi bukan jalan yang mudah ditempuh oleh negara yang memiliki riwayat panjang dalam cengkeraman kekuasaan otoritarian. Ketidakmampuan mengelola rute konsolidasi demokratisasi secara tepat dan elegan akan berujung pada kegagalan membangun demokrasi. Maka, yang berpotensi terjadi adalah involusi politik, kudeta, revolusi, reotoritarian kekuasaan, atau titik nol rute demokratisasi.

Studi Suchit Bunbongkarin (1987) tentang politik militer di Thailand 1981-1986 menjelaskan bahwa militer di Thailand memang memiliki karakter hasrat politik yang besar. Kudeta militer terjadi karena militer sangat berambisi berkuasa, sedangkan kaum politikus sipil lemah dan terpecah. Kudeta yang mereka lakukan biasanya bersandar pada argumen “kegagalan” politikus dan mengusung aspirasi populis. Kudeta militer kali ini persis seperti itu: Perdana Menteri Yingluck dinilai korupsi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Klaim kegagalan politikus dan merajalelanya korupsi

juga dikemukakan oleh Jenderal Pervez Musharraf ketika melakukan kudeta di Pakistan pada 1999.

Apa pun alasannya, kudeta adalah rotasi kekuasaan yang tidak memenuhi kaidah prosedur politik demokratis. Namun, klaim argumen yang diusung oleh militer ketika melakukan kudeta seyogianya menjadi renungan bagi para aktor prodemokrasi. Sebab, meskipun kudeta militer itu tidak memiliki legitimasi konstitusional dan elektoral, kudeta militer yang mengusung retorika populis mudah menuai dukungan rakyat, secara eksplisit atau implisit. Apalagi jika pascakudeta itu ternyata militer memenuhi janji populisnya dan mampu membuat keadaan lebih baik daripada di bawah pimpinan politikus dalam sistem politik demokratis.

Itulah yang menjadi tantangan dalam praktek demokrasi. Harus ada pembuktian nyata bahwa demokrasi yang diterapkan bukan sekadar ungguan bagi segelintir elite untuk memuluskan ambisi dan kepentingan mereka sambil meminggirkan kepentingan rakyat. Praktek kekuasaan otoritarian yang menindas kebebasan memang ditentang, tapi demokrasi yang hanya meleluaskan libido kekuasaan dan korupsi para elite juga ditolak. Praktek demokrasi yang hanya menghasilkan harga membubung tinggi, pengangguran meningkat, dan kemiskinan bertambah justru akan mengancam masa depan praktek demokrasi itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai defisiensi demokrasi, yang membuat rakyat tidak peduli siapa pun



yang berkuasa asal mereka menjadi sejahtera. Maka, jika produk suram praktek demokrasi itu bergandeng dengan kecenderungan militer untuk berkuasa secara tidak demokratis, hasilnya adalah kudeta militer.

Studi ilmuwan politik Samuel P. Huntington menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi, yang menciptakan kondisi bagi demokratisasi, dapat mengurangi kemungkinan kudeta oleh pihak militer. Huntington meneliti bahwa selama gelombang ketiga demokratisasi, usaha kudeta terhadap pemerintah demokrasi yang masih baru, dengan sedikit pengecualian (Nigeria, Haiti, dan Sudan), pada umumnya gagal. Negara dengan GNP per kapita di atas US\$ 1.000 tidak pernah mengalami kudeta yang berhasil, dan tak satu pun negara dengan GNP di atas US\$ 3.000 yang pernah menyaatkan upaya kudeta. Kudeta militer yang berhasil hanya terjadi di negara dengan GNP per kapita di bawah US\$ 1.000 (Larry Diamond & March F. Plattner [ed.], 2000).

Kudeta militer bukan tindakan yang tiba-tiba dan mudah dilakukan. Menurut Lilia Shevtsova, ada tiga prakondisi yang harus dipenuhi sebelum militer melancarkan kudeta atau mendukung kudeta oleh pemimpin sipil. Pertama, adanya pemimpin yang karismatik (terutama yang berasal dari militer). Kedua, eksistensi organisasi yang mampu merencanakan kudeta dan melengkapinya dengan selubung ideologis serta suatu agenda politik. Ketiga,

kemauan di pihak rekan konspirasi untuk memberikan derajat otonomi yang tinggi kepada militer di dalam rezim yang baru (Larry Diamond & March F. Plattner [ed.], 2000). Artinya, kudeta militer yang mengabaikan prakondisi ini adalah kudeta yang nekat dan mudah menjadi gagal.

Sebagaimana demokratisasi dapat membawa efek bola salju, kudeta militer yang sukses berpotensi pula menular. Karena itu, potensi kudeta militer harus dibendung dengan cara tidak memberi basis justifikasi kemunculannya (*noblesse oblige*). Kudeta militer yang terjadi di Thailand pada saat ini menunjukkan, mencegah kudeta militer tidak cukup hanya dengan berhasil menjinakkan militer agar mau meninggalkan peran politiknya.

Untuk itu, bagi negara yang tengah menempuh demokratisasi, penting sekali membuktikan kepada rakyat bahwa demokrasi lebih mampu menciptakan keadaan yang lebih baik daripada sistem politik otoritarian. Harus dicegah merebaknya frustrasi rakyat yang disebabkan oleh praktek demokrasi yang hanya fokus pada demokrasi politik, tapi abai pada demokrasi ekonomi dan pemberantasan korupsi. Pengabaian atau ketidakmampuan pemerintah yang dipilih secara demokratis memenuhi ekspektasi populus itu bermakna mengetuk pintu barak agar militer tergoda melakukan kudeta.¹⁰

¹⁰ kudeta militer :

Kudeta yang dilakukan oleh militer merupakan suatu wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan Negara yang dimiliki oleh sekelompok pasukan tentara, sebagai tentara yang seluruh pengabdianya hanya diperuntukan untuk demi kesetiaan kepada bangsa dan Negara, maka pasukan militer tidak mempunyai pilihan diantara pilihan setia pada bangsa dan negara atau setia kepada pemimpin negara yang menyebabkan kehancuran.¹¹

Kudeta militer terjadi pada 22 Mei 2014, ketika anggota-anggota Angkatan Darat Kerajaan Thailand. Pimpinan oleh Prayuth Chan-ocha menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Thailand, Kudeta ini terjadi karena alasan ketidakstabilan negara juga menjadi alasan bagi Jenderal Prayuth saat mengambil kursi pemerintahan dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014. Jenderal mengaku mempunyai banyak alasan lain hingga terpaksa melakukan kudeta. Salah satunya yang sering dia katakan adalah per tim bangan keamanan dan keberlangsungan negara. Tentu banyak yang tak terima dengan alasan Prayuth. Namun, tak sedikit rakyat yang senang menyambut aksinya. Banyak negara yang mengecam aksi Prayuth. Mereka juga mengeluarkan peringatan

<http://korantempo.com/korantempo/2006/09/22/Opini/krn.20060922.68.id.html> diakses pada 26 Febuari 2018 Pukul 12:53 WIB.

¹¹Definisi kudeta dilakukan oleh militer : <http://wacana-ngunandiko.blogspot.co.id/diakses> pada 08 September 2017 pukul 14:00 WIB.

kepada para warga negara masing-masing agar tak mendatangi Thailand.¹²

Pemerintahan Thailand di bawah kendali Perdana Menteri Prayuth mengakhiri masa "darurat militer" pada 1 April lalu setelah 10 bulan berkuasa lewat kudeta militer. Namun, tampaknya sentuhan militer belum hilang dari pemerintahan ini. Bahkan, Prayuth menyatakan akan menerapkan tindakan pengamanan khusus negara melalui "dictator law".

Oleh karena itu, Panglima Militer Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha mengambil alih pemerintahan Thailand, Kamis 22 Mei dua hari setelah mendeklarasikan keadaan darurat. Dia mengatakan militer akan merestorasi pemerintah, dan memaksakan reformasi setelah enam bulan kisruh politik.



E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari rencana penelitian karena berisi gambaran cara memperoleh data untuk

¹² Kudeta militer di Thailand 2014 : <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/04/17/nmy36f39-virus-kudeta> diakses pada 14 Febuari 2018 pukul 13:31 WIB.

menjawab permasalahan penelitian.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yaitu menggunakan data yang dapat berupa kata-kata untuk menerangkan suatu fenomena, sehingga akan penelitian ini tidak diperlukan adanya hipotesa. Lengkapnya, metode ini menitik beratkan pada proses penggalian data-data kualitatif yang didapatkan melalui sumber-sumber tertulis. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif adalah berusaha mendapatkan data-data menyeluruh tentang situasi yang pelajari oleh peneliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa gambaran suatu fenomena. Maleong menyebutkan, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (lisan), serta perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada literatur alamiah secara holistik (utuh).¹⁴

Sumber data berkaitan dengan dari mana data itu diperoleh sehingga biasanya juga disebut dengan jenis data. Jenis yang pertama adalah data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh peneliti dari sumber pemberi informasi. Ini biasanya diperoleh dari wawancara misalnya atau hasil jawaban angket. Jenis kedua adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari

¹³ Metode Penelitian : <http://belajarpikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/> diakses pada 13 September 2017 pukul 11:28 WIB.

¹⁴ Lexy Maleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2005, hal.4.: diakses pada 13 September 2017 pukul 11:44 WIB.

sumber pemberi informasi tetapi sudah melalui sumber kedua, ketiga dan seterusnya.

Sumber data ada penelitian ini adalah sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh melalui media, gambaran akan masalah yang diteliti berupa ulasan tertulis. Jenis data digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data tertulis seperti buku, jurnal, ilmiah, laporan riset, surat kabar, majalah, internet dan media lain yang relevan dengan penelitian ini.

Terkait teknik pengumpulan data, penulis menggunakan kajian literatur serta studi pustaka terhadap data-data dengan menggunakan sumber baik berupa jurnal, buku, artikel, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lainnya. Selain itu juga, penulis menghimpun data kuantitatif yang sesuai dengan pembahasan dan dapat mendukung argument/ penulisan proposal ini.

Selain itu, dalam pengumpulan data, penulis juga melakukan internet research atau penggunaan data-data yang diperoleh dari situs (website) internet. Numun penulis hanya menggunakan data dari situs yang dianggap relevan dan otoritatif sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh melalui internet research ini bersifat sebagai data tambahan/pendukung.

Teknik analisa data yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data yang

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang di amati kemudian setelah data terkumpul dan lengkap,dipilih disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang akan di balas dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran penelitian secara sistematis dan untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian,penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis kudeta militer PM Yingluck Shinawatra pada tahun 2014” ini dibagi menjadi empat bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I : Pedahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan penelitian, landasan teori ,metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum kudeta militer dalam politik Thailand.

Bab ini akan membahas tentang militer Thailand dan peran militer dalam upaya kudeta militer terhadap PM Yingluck Shinawatra,krisis politik terhadap PM Yingluck.

BAB III : Analisis kudeta militer Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada tahun 2014.



Bab ini akan analisis mengenai kudeta militer dan Faktor-faktor terjadi kudeta militer terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada tahun 2014

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

